

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, pemerintah pusat mewujudkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian direvisi lagi menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 21 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya (Maimunah, 2006). Tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan memajukan ekonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan (UU Nomor 33 Tahun 2004). PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai

perwujudan desentralisasi. Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dengan ini untuk mengatasi penerimaan fiskal pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antar daerah yang maju dengan daerah yang kurang berkembang masih dapat diperkecil.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat,

pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup saat lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan, yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Sejak kali pertama IPM diperkenalkan, *United National Development Programme* (UNDP) selalu berkesinambungan dalam mencatat perkembangan pembangunan manusia di berbagai negara. Pada tahun 2015, UNDP mencatat bahwa IPM di Indonesia telah mencapai 68,9. IPM 2015 mengalami peningkatan capaian sebesar 0,2 dari tahun sebelumnya. Dengan tingkat IPM tersebut, Indonesia masih menyandang predikat “sedang” dalam pembangunan manusia. Meskipun demikian, Indonesia masih berada di peringkat 113 dari 188 negara di tahun 2015. Sementara itu, di ASEAN Indonesia berada pada posisi ke-5 setelah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand.

Keberhasilan Indonesia tidak lepas dari perkembangan indikator yang menyusun pembangunan manusia. Seluruh indikator menunjukkan perkembangan yang positif selama 25 tahun terakhir. Angka Harapan hidup

saat lahir di Indonesia meningkat 5,8 tahun selama periode 1990-2015. Pada bidang pendidikan, harapan lama sekolah di Indonesia meningkat 2,8 tahun selama 25 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah Indonesia telah meningkat 4,6 tahun. Sedangkan untuk Pendapatan per kapita Indonesia selama 25 tahun ini juga meningkat sebesar 5.783.

Dalam mewujudkan terselenggaranya pendidikan dengan mutu atau kualitas yang baik pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bentuk keseriusan pemerintah dan DPR dalam bidang pendidikan tertuang dalam pasal 31 ayat 4 UUD 1995 yang menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pemerintah Republik Indonesia tengah berkonsentrasi penuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Presiden Jokowi juga memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan di Indonesia lewat komitmennya dalam Nawacita. Untuk merealisasi itu, pemerintah menyusun Program Indonesia Pintar (PIP) yang secara hukum tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (BPS, 2017).

Peran pemerintah sangat penting dalam upaya pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, karena pendidikan merupakan barang publik atau sebagai hak-hak sosial yang dijamin oleh pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

tentang “ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DENGAN BELANJA DAERAH BIDANG PENDIDIKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Se-Jawa)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan belanja daerah bidang pendidikan sebagai variabel moderating?
4. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan belanja daerah bidang pendidikan sebagai variabel moderating?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan belanja daerah bidang pendidikan sebagai variabel moderating.
4. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan belanja daerah bidang pendidikan sebagai variabel moderating.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal pengembangan wawasan dibidang belanja daerah bidang pendidikan dalam pemerintah daerah.

2. Bagi pemerintah daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Belanja Daerah Bidang Pendidikan sebagai variabel moderating (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Se-Jawa).

3. Bagi pembaca dan almamater

Semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan referensi atau bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang belanja daerah bidang pendidikan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar untuk membahas permasalahan yang akan diteliti yaitu meliputi teori otonomi daerah, teori pendapatan asli daerah, teori dana alokasi umum, teori indeks pembangunan manusia, teori

belanja daerah bidang pendidikan, penelitian terdahulu, serta pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data dan teknik pengumpulan data, variabel penelitian, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi menguraikan mengenai deskripsi data penelitian, dan deskripsi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta memuat saran-saran untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN